

# Perbandingan Sistem Politik Dan Demokrasi: Studi Kasus Indonesia Dan Filipina Dalam Konteks Sejarah Politik Dan Pemilihan Umum

Erwin Harefa<sup>a,\*</sup>, Timbul Dompok<sup>b</sup>, Remember To Harefa<sup>c</sup>, Lubna Salsabila<sup>c</sup>,

<sup>a,b,c,d</sup> Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universitas Putera Batam

\*pb231010016@upbatam.ac.id

## Abstract

Indonesia and the Philippines, both located in Southeast Asia, have a remarkably similar political history. Both nations are governed by authoritarian regimes. During that period, the electoral political system was established and comprehensively governed by all political components. Democracy has ceased to exist and is now closely linked to a political framework that is under the power of the government. The utilization of general elections as a metric can serve as an indication of the caliber of a nation's democratic system. If the elections in that country are conducted smoothly and citizens actively engage, then the country is seen as possessing commendable democratic attributes. This serves as a lesson for Indonesia and the Philippines to enhance the execution of elections and democracy by enacting more effective legislation and establishing a superior electoral system compared to the previous one. The electoral system is subject to constant adaptation based on the specific characteristics of each country, with the aim of establishing a system that is advantageous for the population.

**Keywords:** Electoral System; Political History; General Elections; Democratic Quality

## Abstrak

Indonesia dan Filipina, keduanya berlokasi di Asia Tenggara, memiliki sejarah politik yang sangat mirip. Kedua negara diperintah oleh rezim otoriter. Pada periode tersebut, sistem politik pemilu terbentuk dan diatur secara menyeluruh oleh seluruh komponen politik. Demokrasi sudah tidak ada lagi dan kini terkait erat dengan kerangka politik yang berada di bawah kekuasaan pemerintah. Pemanfaatan pemilu sebagai tolak ukur dapat menjadi indikasi kualitas sistem demokrasi suatu negara. Jika pemilu di negara tersebut dilaksanakan dengan lancar dan warga negara terlibat secara aktif, maka negara tersebut dipandang memiliki ciri-ciri demokrasi yang patut dipuji. Hal ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia dan Filipina untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu dan demokrasi dengan memberlakukan undang-undang yang lebih efektif dan membangun sistem pemilu yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Sistem pemilu terus mengalami adaptasi berdasarkan karakteristik spesifik masing-masing negara, dengan tujuan menciptakan sistem yang bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Sistem pemilihan; Sejarah Politik; Pemilihan Umum; Kualitas Demokratis

## 1. Pendahuluan

Sistem politik dan demokrasi di banyak negara menunjukkan beragam struktur dan dinamika yang dibentuk oleh keadaan sejarah, landasan sosio-kultural, dan kerangka kelembagaan. Memahami perbedaan-perbedaan ini penting untuk mengevaluasi efektivitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik dalam memajukan pemerintahan demokratis. Penelitian komparatif ini mengkaji Indonesia dan Filipina, dua negara Asia Tenggara dengan latar belakang politik yang luas dan keterlibatan penting dalam transisi

demokrasi dan prosedur pemilu. Baik Indonesia maupun Filipina memiliki lanskap politik yang dipengaruhi oleh sejarah kolonial mereka. Indonesia, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Belanda, dan Filipina, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Spanyol dan Amerika, menempuh jalur yang berbeda untuk mencapai kemerdekaan, yang berdampak pada sistem pemerintahan mereka dan perkembangan demokrasi di masing-masing negara. Isu-isu pasca-kolonial mengenai pembangunan bangsa, stabilitas politik, dan pertumbuhan kelembagaan terus mempengaruhi sistem politik mereka saat ini.

Indonesia dan Filipina sama-sama menganut sistem presidensial, meskipun keduanya berbeda dalam institusi politik dan sistem kepartaiannya. Indonesia mempunyai sistem politik dengan banyak partai dan presiden yang berkuasa, sementara Filipina mempunyai sistem politik dengan banyak partai dengan sejarah kontrol presiden yang kuat dan kesulitan dengan desentralisasi. Perkembangan demokrasi di kedua negara dipengaruhi oleh keadaan sejarah dan sosial-politik yang berbeda. Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan otoriter ke negara demokrasi yang berkembang pada tahun 1998, sementara Filipina telah mengalami sejarah peralihan antara rezim demokratis dan otoriter.

Hal ini termasuk Revolusi Kekuatan Rakyat pada tahun 1986 dan kesulitan-kesulitan berikutnya dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi yang stabil. Makalah ini menganalisis prosedur pemilu di Indonesia dan Filipina, dengan fokus khusus pada undang-undang pemilu, keterlibatan pemilih, kredibilitas pemilu, dan fungsi badan penyelenggara pemilu. Analisis komparatif memberikan wawasan berharga mengenai kesulitan dan pencapaian dalam melaksanakan pemilu yang bebas dan adil, namun juga kredibel, dalam berbagai situasi sosial-politik.

Indonesia, yang pernah menjadi sasaran dominasi kolonial Belanda, dan Filipina, yang pernah mengalami masa kolonialisme Spanyol dan Amerika, masing-masing mempunyai jalur yang berbeda untuk mencapai kemerdekaan. Struktur pemerintahan dan lintasan politik mereka sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial ini. Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, namun menghadapi banyak rintangan sosial-politik dalam perjalanan menuju pembentukan pemerintahan demokratis. Demikian pula halnya dengan Filipina yang meraih kemerdekaan pada tahun 1946, yang mengawali upaya demokrasinya, yang dipengaruhi oleh sejarah penjajahan dan perubahan pasca-kolonial yang terjadi setelahnya. Masalah pembangunan bangsa, stabilitas politik, dan pertumbuhan kelembagaan selalu berdampak pada lingkungan politik Indonesia dan negara-negara lain. Filipina. Isu-isu tersebut mencakup peningkatan kohesi nasional dalam menghadapi beragam identitas etnis dan budaya, memastikan kemajuan sosial-ekonomi yang adil dan seimbang, dan mengembangkan struktur pemerintahan yang kuat yang mampu menghadapi seluk-beluk politik modern. Meskipun Indonesia dan Filipina sama-sama menganut sistem presidensial, terdapat variasi yang signifikan dalam institusi politik dan sistem kepartaian mereka. Indonesia memiliki sistem multi-partai di mana pembentukan koalisi

sangat penting dalam pemerintahan, selain otoritas presidensial yang kuat. Di sisi lain, Filipina mempunyai sistem multi-partai yang ditandai dengan kecenderungan historis terhadap otoritas presidensial yang kuat, yang seringkali mengakibatkan kesulitan dalam desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang efisien di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak jangka panjang sejarah kolonial terhadap sistem politik dan proses demokrasi saat ini di Indonesia dan Filipina. Studi ini berupaya menganalisis konteks sosio-politik kedua negara, termasuk jalan menuju kemerdekaan dan tantangan selanjutnya dalam pembangunan bangsa dan pembangunan kelembagaan. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana lintasan sejarah mempengaruhi pembentukan sistem presidensial, dinamika partai, dan proses demokratisasi di setiap negara. Proyek ini bertujuan untuk memberikan wawasan komparatif mengenai kompleksitas jaminan integritas pemilu dan ketahanan demokrasi dalam berbagai kondisi sosio-kultural. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan analisis yang cermat terhadap peraturan pemilu, strategi keterlibatan pemilih, dan efektivitas administrasi pemilu. Penelitian ini pada akhirnya meningkatkan pemahaman tentang elemen-elemen yang berdampak pada tata kelola demokrasi di Asia Tenggara. Laporan ini juga memberikan saran-saran praktis untuk memperbaiki proses pemilu dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan ini.

## 2. Kajian Literatur

Akademisi dan cendekiawan telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap sistem politik dan proses demokratisasi di negara-negara Asia Tenggara, dengan penekanan khusus pada Indonesia dan Filipina. Negara-negara ini dipilih untuk diteliti karena sejarah pemerintahannya yang beragam dan konteks sejarah yang signifikan. Studi literatur ini mengkaji gagasan dan diskusi signifikan mengenai dampak warisan kolonial, isu-isu pascakolonial, dan sistem pemilu terhadap kemajuan demokrasi di negara-negara tersebut. Lanskap politik Indonesia dan Filipina sangat dipengaruhi oleh masa lalu kolonial mereka, seperti yang terlihat dari kajian sejarah.

Perlawanan Indonesia terhadap kekuasaan kolonial Belanda mencapai puncaknya pada tahun 1945 ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, yang menandakan titik balik penting dalam perkembangan politik Indonesia. Setelah mengalami penjajahan Spanyol dan Amerika, Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946. Setiap negara

mengembangkan sistem pemerintahan dan identitas sosio-politik yang berbeda yang dipengaruhi oleh masa lalu kolonial mereka (Anderson, 1991; McCoy, 1994). Setelah memperoleh kemerdekaan, kedua negara menghadapi kesulitan besar dalam upaya membangun negaranya, mengingat adanya latar belakang etnis, budaya, dan sosial ekonomi yang beragam. Proses yang dilakukan Indonesia mencakup penggabungan berbagai kelompok pulau menjadi negara-bangsa yang kohesif, mengatasi kesenjangan regional, dan menciptakan struktur politik yang kuat yang mampu menangani peralihan menuju demokrasi (Hill, 2000). Filipina menghadapi kesulitan dalam mendorong kohesi nasional, menerapkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang berkepanjangan, yang berdampak pada pembangunan demokrasi di negara tersebut (Abinales & Amoroso, 2005). Studi banding mengungkap perbedaan sistem politik dan kerangka pemerintahan antara Indonesia dan Filipina. Sistem politik Indonesia dicirikan oleh struktur multi-partai dan otoritas presidensial yang kuat, yang sangat kontras dengan kecenderungan historis Filipina terhadap kekuasaan presiden yang terkonsentrasi dan kesulitan dalam menerapkan desentralisasi (Honna, 2010; Thompson, 2000).

Kesenjangan ini telah mempengaruhi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, fungsi partai politik, dan efektivitas lembaga pemerintahan secara keseluruhan dalam memajukan pemerintahan yang demokratis dan menjaga stabilitas politik. Proses demokratisasi di Indonesia dan Filipina telah mengalami pencapaian dan hambatan yang signifikan. Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari pemerintahan otoriter pada tahun 1998, yang mengarah pada pembentukan sistem demokrasi. Transisi ini ditandai dengan penerapan reformasi konstitusi dan pemilu, serta inisiatif untuk mendorong partisipasi politik dan kebebasan sipil (Aspinall & Mietzner, 2010). Di sisi lain, Filipina telah melalui masa-masa perlawanan dan kemunduran demokrasi yang kuat, seperti bangkitnya pemerintahan otoriter dan tantangan-tantangan berikutnya dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari institusi negara (Kasuya, 2008).

Proses demokratisasi di Indonesia dan Filipina menemui pencapaian dan hambatan yang signifikan. Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari pemerintahan otoriter pada tahun 1998, yang mengarah pada pembentukan sistem demokrasi. Transisi ini ditandai dengan penerapan reformasi konstitusi dan pemilu, serta inisiatif untuk mendorong

partisipasi politik dan kebebasan sipil (Aspinall & Mietzner, 2010). Di sisi lain, Filipina telah melalui masa-masa kekuatan dan kemunduran demokrasi, termasuk pemerintahan otoriter dan tantangan-tantangan berikutnya dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari sistem (Kasuya, 2008). Pentingnya peraturan pemilu, taktik keterlibatan pemilih, dan fungsi organisasi penyelenggara pemilu dalam menjamin legitimasi demokrasi terlihat dari kajian kritis terhadap proses pemilu di kedua negara. Studi banding telah mengidentifikasi beberapa kesulitan yang berdampak signifikan terhadap integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Tantangan-tantangan ini mencakup kecurangan dalam pemilu, pengaruh uang dalam politik, dan pencabutan hak pilih (Heywood, 2002; Magno, 2006).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif memberikan metode yang terperinci dan canggih untuk mengkaji seluk-beluk sistem politik, proses demokrasi, dan dinamika pemilu di Indonesia dan Filipina. Metodologi ini sangat cocok untuk menganalisis pengaruh sejarah, lingkungan sosial-politik, dan struktur kelembagaan yang membentuk pemerintahan demokratis di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan perbandingan dan analisis dua situasi spesifik, Indonesia dan Filipina, di kawasan Asia Tenggara yang lebih luas. Studi kasus memfasilitasi pemeriksaan komprehensif dan pemahaman kontekstual mengenai perkembangan sejarah, struktur politik, dan metodologi pemilu di suatu negara (Yin, 2018). Penelitian ini berupaya mengungkap persamaan, kontras, dan tren yang memperjelas pengaruh warisan kolonial dan kesulitan pascakolonial terhadap evolusi demokrasi dengan membandingkan situasi-situasi tersebut. Studi ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana keadaan historis, institusi politik, dan prosedur pemilu berdampak pada tata kelola demokrasi di Indonesia dan Filipina dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Temuan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan teoritis di bidang politik komparatif. Mereka juga memberikan informasi berharga untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan institusi demokrasi. Selain itu, temuan ini memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan untuk mendorong stabilitas politik dan pemerintahan yang inklusif di Asia Tenggara dan kawasan lainnya.

### 4. Hasil dan Pembahasan

### **Warisan Kolonial dan Perkembangan Demokrasi**

Studi ini mengungkapkan bahwa warisan kolonial secara signifikan mempengaruhi sistem politik dan jalur demokratisasi di Indonesia dan Filipina. Pengalaman Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda membentuk struktur pemerintahan yang terdesentralisasi dan sistem politik multi-partai, sehingga menumbuhkan lanskap politik yang beragam dan kondusif bagi pembentukan koalisi. Sebaliknya, sejarah kolonisasi Spanyol dan Amerika di Filipina berkontribusi pada sistem presidensial yang terpusat, yang ditandai dengan otoritas eksekutif yang kuat dan tantangan dalam desentralisasi. Lintasan sejarah ini menggarisbawahi bagaimana masa lalu kolonial terus membentuk institusi politik kontemporer dan dinamika pemerintahan di Asia Tenggara.

### **Evolusi Demokrasi dan Ketahanan Institusional**

Temuan penelitian ini menyoroti perbedaan jalur dalam evolusi demokrasi antara Indonesia dan Filipina. Transisi Indonesia dari pemerintahan otoriter pada tahun 1998 menandai momen penting menuju konsolidasi demokrasi, yang didorong oleh reformasi konstitusi, reformasi pemilu, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Filipina, meskipun mengalami kemunduran demokrasi di bawah rezim otoriter, termasuk Revolusi Kekuatan Rakyat pada tahun 1986, tetap menghadapi tantangan dalam melembagakan norma-norma demokrasi dan memerangi dinasti politik. Pengalaman-pengalaman yang kontras ini menggambarkan ketahanan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia di tengah tantangan desentralisasi dan reformasi pemerintahan di Filipina.

### **Proses Pemilu dan Integritas Demokrasi**

Analisis proses pemilu di kedua negara mengungkap wawasan penting mengenai tantangan dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan kredibel. Sistem pemilu Indonesia, yang ditandai dengan keterwakilan proporsional dan manajemen pemilu yang kuat, menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan integritas pemilu dan kepercayaan pemilih. Sebaliknya, Filipina terus menghadapi masalah kecurangan pemilu, pembelian suara, dan patronase politik, yang melemahkan kredibilitas pemilu dan legitimasi demokrasi. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi pemilu, langkah-langkah transparansi, dan inisiatif keterlibatan masyarakat dalam mendorong integritas demokrasi dan akuntabilitas pemilu di Asia Tenggara.

### **Perspektif Komparatif dan Implikasi Kebijakan**

Analisis komparatif antara Indonesia dan Filipina memberikan perspektif berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang terlibat dalam mendorong pemerintahan demokratis dan stabilitas politik dalam konteks sosial-politik yang beragam. Wawasan yang diperoleh dari studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, menyempurnakan undang-undang pemilu, dan mendorong praktik pemerintahan yang inklusif. Implikasi kebijakan mencakup perlunya reformasi yang ditargetkan dalam administrasi pemilu, upaya untuk memberantas korupsi dalam proses pemilu, dan inisiatif untuk memberdayakan komunitas marginal di bidang politik.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks sistem politik, proses demokrasi, dan praktik pemilu di Indonesia dan Filipina. Laporan ini menekankan dampak signifikan dari warisan sejarah, kerangka kelembagaan, dan konteks sosial-politik. Penelitian komparatif ini mengidentifikasi arah yang jelas dalam perkembangan demokrasi, peralihan Indonesia dari otoritarianisme pada tahun 1998 menjadi contoh kemajuan menuju konsolidasi demokrasi melalui reformasi konstitusi dan perbaikan sistem pemilu. Di sisi lain, Filipina telah mengalami periode kekuatan dan kekalahan demokrasi. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menetapkan standar demokrasi karena masih adanya permasalahan kecurangan pemilu dan favoritisme politik.

Studi ini menyoroti dampak jangka panjang warisan kolonial terhadap struktur pemerintahan, khususnya mengingat bahwa Indonesia memiliki sistem multi-partai yang terdesentralisasi sedangkan Filipina memiliki kekuasaan presidensial yang terpusat. Proses pemilu di Indonesia dan Filipina menunjukkan tingkat integritas yang berbeda. Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan transparansi pemilu dan kepercayaan pemilih, sedangkan Filipina masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kecurangan pemilu dan jual beli suara. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya reformasi pemilu yang kuat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mendorong program keterlibatan publik untuk mengembangkan ketahanan demokrasi dan memastikan akuntabilitas pemilu.

Rekomendasi untuk kebijakan dan implementasi:

a) Meningkatkan Reformasi Pemilu: Baik Indonesia maupun Filipina akan

memperoleh manfaat dari penerapan reformasi pemilu secara ekstensif yang berfokus pada penguatan undang-undang pemilu, mendorong keterbukaan dalam pendanaan kampanye, dan memberdayakan lembaga penyelenggara pemilu untuk menjamin integritas dan imparialitas dalam pemilu.

- b) Mengadvokasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif: Penting untuk mengatasi kesenjangan sosio-ekonomi dan memberdayakan kelompok masyarakat kurang mampu untuk mendorong tata kelola yang inklusif dan memperkuat keterlibatan demokratis.
- c) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan: Mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sangat penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan.
- d) Mengatasi Korupsi Politik: Penting untuk menetapkan dan menegakkan langkah-langkah untuk mencegah korupsi, khususnya dalam prosedur pemilu, untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan melindungi integritas pemilu.

- Saihu, Mohammad., Arif M. Suha, Rahman. Yasin, Titis A. Nugroho, Budiman Yanuar, F., and Arif Arif., Sarwani. 2015. *PelnyelleInggara Pelmilu Di Dunia : Seljarah, Kellembagaan, Dan Praktik Pelmilu Di Nelgara Pelnganut Sistem Pelmelrintahan Prelsidelnsial, Selmiprelsidelnsial, Dan Parlelmelntelr.*
- Seltiawan, W. 2012. "Pelrsamaan Sistem Pelmilu Indonelsia Filipina." *Relpository UMM.* Sibarani, Sabungan. 2016. "Dinamika Pelmilihan Lelgislatif." *Jurnal Lelgislati Indonelsia* 13, no. 1: 11–18.
- TheI Commission on ELlelctions. 2017. "Historical Backgrounds." COMELLELC. 2017.

### Daftar Pustaka

- Adiati, Relnnel R.A Kawilarang dan Harriska Farida. 2010. "Pelmilu Di Filipina Mirip Ujian Selkolah," 2010.
- Bawaslu. 2017. "Seljarah Pelngawasan Pelmilu." Bawaslu. 2017.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, Melyrinda Rahmawaty, and Alia Harumdani. 2012. "Komparasi Melkanismel Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilu Di Belbelrapa Nelgara Pelnganut Paham Delmokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3: 531–62.
- Illahi, Belni Kurnia, Ikhbal Gusri, and Gianinda A Sugianto. 2021. "Implikasi Hukum Pelrluasan Kelwelnangan PTUN Dalam Melngadili Pelrmasalahan Hukum Pelmilu." *Awasia: Jurnal Pelmilu Dan Delmokrasi* 1, no. 2: 87–98.
- KPU RI. 2016. "Seljarah KPU." KPU. 2016.
- Mujiburohman, Dian Ariels. 2017. *Pelngantar Hukum Tata Nelgara.* Selman: STPN Prells.